

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN LABEL  
HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN  
YANG BEREDAR DI PASARAN**

**SKRIPSI**



Oleh  
**Rega Juliver Triwahyudi Pangaribuan**  
**140710053**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2019**

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN LABEL  
HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN  
YANG BEREDAR DI PASARAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh  
Rega Juliver Triwahyudi Pangaribuan  
140710053**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2018**

## **SURAT PERNYATAAN**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana dan/atau magister), baik di Universitas Putera Batam maupun di perguruan tinggi lain;
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari pembimbing;
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi

Batam, 16 Februari 2019  
Yang membuat pernyataan,

**Rega Juliver Triwahyudi Pangaribuan**  
**140710053**

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN LABEL  
HALAL TERHADAP PRODUK MAKANAN  
YANG BEREDAR DI PASARAN**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu  
syarat memperoleh gelar sarjana**

**Oleh  
Rega Juliver Triwahyudi Pangaribuan  
140710053**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal  
seperti tertera dibawah ini**

**Batam, 16 Februari 2019**

**Irene Svinarky, SH., M.Kn  
Pembimbing**

## **ABSTRAK**

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama muslim perlu adanya perhatian terhadap produk makanan yang bebas dipasaran. Label halal buka hanya untuk sekadar pemenuhan kebutuhan lahiriah, tetapi juga untuk kebutuhan dasar bagi Negara yang mayoritas memeluk agama islam perlu adanya perhatian khusus pada produk makanan yang beredar dipasaran. Ini bukan hanya melihat dari komponen yang menyehatkan dari medis saja, melainkan juga perlu diperhatikan bahwa makanan yang dikonsumsi tersebut sehat dan halal. Pencantuman labelisasi halal pada dasarnya tidak wajib atau bersifat sukarela, namun bila ditemukan produsen yang memalsukan label tanpa adanya dilakukan sertifikat maka produsen tersebut akan diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan-peraturan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan agar masyarakat mengetahui informasi yang jelas dan jujur mengenai produk yang mereka beli dipasaran. Dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian normatif.tujuan dari penulisan ini adalah bertujuan mengetahui bagaimana pemberian label dan sanksi apa yang dikenakan bila produsen melanggar ketentuan sertifikasi dan labelisasi halal.terkait dengan perijinan sertifikasi itu adalah kewenangan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) dan untuk pemberian label dilakukan oleh Badan Pemeriksa Obat dan Makanan (BPPOm) setelah mendapatkan berkas perijinan dari LPPOM MUI. Terkait dengan undang-undang jaminan produk halal nomor 33 tahun 2014 masih menunggu peraturan pemerintah (PP) untuk bisa dijalankan sesuai undang-undang Badan Pemeriksa Jaminan Produk Halal (BPJPH) nantinya setelah dikeluarkan PP tersebut maka kewenangan sertifikasi ada di BPJPH.

Kata kunci: Label halal, sanksi bagi produsen/pelaku usaha.

## **ABSTRACT**

*Indonesia as a country with the majority Muslim religion needs attention to food product that are free in the market. Halal labels are open only to fulfill their outward needs, but also for the basic needs of a country that is predominantly Muslim, there needs to be special attention to food product that are circulating in the market. This is not only seen from healthy components from the medical sector, but also needs to be noted that the food consumed is healthy. Basically, the inclusion of halal labeling is not mandatory or voluntary, but if a manufacturer is found to falsify a label without a certificate being carried out, the producer will be sanctioned in accordance with the applicable laws or regulations. This is done so that people know clear and honest information about the products they buy in the market. In this thesis the author uses normative research methods. The purpose of this paper is to find out how to label and sanction what is imposed if the producer violates the provisions of halal certification and labeling. Related to the licensing of certification is the authority of the Indonesian Ulema Council (MUI) through the Assessment Institute Food, Medicine and Cosmetics (LPPOM MUI) and for labeling were carried out by the Drug and Food Inspection Agency (BPPO) after obtaining the permit file from LPPOM MUI. Regarding the law on guarantee of halal product number 33 of 2014 still awaiting government regulations (PP) to be carried out in accordance with the laws of the Halal Product Guarantee Board (BPJPH) later after the PP is issued, the certification authority is at BPJPH.*

*Keywords:* Halal label, sanctions for producers / business actors.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada jurusan Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu, kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa laporan skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom, M.SI., selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Suhardianto, S. Hum., M. Pd., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam;
3. Ibu Rizky Tri Augrah Bhakti, SH., M.H, selaku Wakil Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam;
5. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn., sebagai dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktunya dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

6. Segenap dosen Program studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Putera Batam;
7. Seluruh teman-teman Ilmu Hukum Universitas Putera Batam dari semester 1 hingga semester 7 tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat berguna untuk menambah pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 16 Februari 2019

Rega Juliver Triwahyudi Pangaribuan

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN .....	i
SURAT PERNYATAAN.....	iii
ABSTRAK .....	iv
<i>ABSTRACT</i> .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Batsan Masalah .....	10
1.4 Rumusan Masalah .....	11
1.5 Tujuan Penelitian.....	11
1.6 Manfaat Penelitian.....	
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kerangka Teori.....	13
2.1.1 Definisi Analisis Yuridis .....	13
2.1.2 Definisi Halal .....	14
2.1.3 Definisi Label .....	15
2.1.4 Defini Label Halal .....	15
2.1.5 Definisi Pemberian Label Halal .....	17
2.2 Kerangka Yuridis .....	20
2.2.1 Tinjauan Umum Hierarki Peraturan Perundang-Undangan .....	20
2.2.2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.....	22
2.2.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.....	22
2.2.4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal .....	24

2.2.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999	
Tentang Label dan Iklan Pangan .....	26
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian.....	28
3.1.1 Jenis Penelitian .....	28
3.1.2 Sifat Penelitian .....	30
3.2 Metodologi Pengumpulan Data.....	31
3.2.1 Jenis Data .....	31
3.2.2 Alat Pengumpulan Data .....	32
3.3 Metode Analisis Data .....	33
3.4 Penelitian Terdahulu .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Hasil Penelitian .....	41
4.1.1 Tata Cara Pemberian Label Halal Dalam Menentukan Kehalalan Suatu Produk.....	41
4.2 Pembahasan .....	55
4.2.1 Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Kepada Produsen Makanan Yang Tidak Mencantumkan Label Halal Pada produk Yang Dihasilkannya .....	55
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Simpulan.....	63
5.2 Saran .....	64
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	